

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut paham demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam setiap urusan politik. Samuel P. Huntington (1991) mengatakan bahwa demokrasi adalah para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat berpartisipasi dalam memberikan suara.¹

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi. Demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah. Dalam sistem pemilihan secara langsung baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota DPRD secara nyata menampilkan representasi dari berbagai aktor-aktor politik dan tidak menutup kemungkinan representasi dari para elit lokal dalam

¹Budiarjo Miriam 1996. Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila, Gramedia. hlm. 107.

mempengaruhi dinamika perpolitikan di daerah terlebih khusus di saat pemilihan umum diselenggarakan. Dalam masyarakat agraris representasi elit lokal dalam berbagai aspek kehidupan, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa representasinya sangat besar.

Penelitian ini memfokuskan diri pada representasi *Maramba* dalam menentukan calon kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Palakahembi). Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa semua warga negara yang berdomisili di daerah seperti halnya di Kabupaten Sumba Timur berhak memilih pada Pemilu Legislatif dan Eksekutif dengan keikutsertaan memenuhi persyaratan sebagai pemilih yakni telah berumur 17 tahun.

Representasi politik *maramba* berangkat dari kepentingan yang beragam dan tersebar di tiap wilayah. Setiap kepentingan tersebut terakomodir dalam institusi kepentingan. Institusi kepentingan di sini bisa lahir dari masyarakat atau bentukan pemerintah. Institusi kepentingan yang dibentuk dari masyarakat secara mandiri sebagai *civil institution* atau organisasi warga.²

Dengan demikian, keberadaan institusi kepentingan sebagai wadah representasi semestinya dapat bertautan dengan *maramba* sebagai representasi politik. Fungsi representasi *maramba* harus dapat melampaui keterwakilan wilayah untuk menghampiri setiap kepentingan yang terakomodir dalam institusi

²Eko Sutoro. (2015). *Community Participation Methods in Design and Planning*. New York: John Wiley and Sons, Inc. Selener. D. 1997

kepentingan. Kedekatan dengan institusi kepentingan yang ada menjadi kunci utama fungsi representasi politik bekerja.

Praktik di lapangan menunjukkan posisi representasi politik *Maramba* baru sebatas pemenuhan unsur keterwakilan tokoh masyarakat di tiap wilayah. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat dan diklaim mewakili kelompok tertentu. Atau dengan kata lain, pemaknaan representasi politik *Maramba* belum menyentuh substansi representatifnya, melainkan sekedar mekanisme proseduralnya. Maka menjadi sulit untuk menghindarkan diri dari elitisme yang kerap menjebak institusi perwakilan *maramba*.

Karena itu, reposisi representasi politik menjadi penting. Reposisi dimaksudkan untuk meletakkan representasi politik *maramba* dalam makna yang substansial, tak sebatas prosedural semata. Representasi substansial di sini menyangkut tiga hal, yaitu kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah, kedekatan atau interaksi dengan institusi kepentingan, dan kontrol *Maramba* terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beetham mengemukakan pemerintahan demokrasi “*is based on popular control and political equality*” (berlandaskan pada kontrol masyarakat dan kesetaraan berpolitik). Maka pemerintahan daerah yang demokratis adalah pemerintahan yang dalam penyelenggaraannya didasarkan atas kontrol masyarakat dan adanya kesetaraan politik warga³.

³*Ibid*

Masyarakat Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu masyarakat yang dalam hidup kesehariannya, taat kepada nilai-nilai adat maupun aturan-aturan adat seperti syukuran adat, upacara kematian (*Pamatu Maling*) dan upacara perkawinan (*Penanti Belis; Willi Tau*) sampai pada kegiatan-kegiatan politik. Dalam konteks sosiologi, elit lokal adalah sosok individu tertentu yang diakui oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai tertentu, antara lain kejujuran, keberanian, empati, pengetahuan yang luas tentang adat istiadat, konsistensi, dan sebagainya.

Penduduk Kabupaten Sumba Timur dalam kehidupan sehari-harinya, masih banyak yang terikat sistem nilai, norma dan aturan-aturan yang menjadi falsafah hidup bagi masyarakat. Dalam hal ini representasi politik *Maramba* menjadi kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Bidang ekonomi, elit lokal lebih banyak berhubungan dengan pemilikan tanah, ternak, tenaga kerja, dan sebagainya termasuk menjadi sumber pemberi legitimasi terhadap pemanfaatan sumber-sumber produksi di masyarakat ketika hendak dimanfaatkan. Demikian pula, di bidang budaya, elit lokal dikenal umumnya sebagai pemegang, pemelihara dan pemberi sanksi terhadap masyarakat yang melanggar nilai-nilai adat yang dipatuhi. Di bidang keamanan dan ketertiban peran elit lokal sangat menonjol yakni selalu memiliki kecenderungan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didalam wilayah adatnya.⁴

Ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang

⁴ Sistem nilai adat. Kabupaten Sumba Timur

dikemukakan sebelumnya bahwa elit lokal (*Maramba*) ialah orang yang dianggap memiliki pengaruh dalam mempengaruhi masyarakat. Dimana pada pemilihan yang berlangsung di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 paket GBY-ULP mendapatkan 65.160 suara atau 54,88% mengungguli paket MK-AL yang hanya mendapatkan 53.557 suara atau 45,12%⁵. Kemenangan tersebut dipengaruhi oleh dukungan *Maramba* terhadap Paket GBY-ULP. Prinsip yang paling menonjol dalam keterlibatan elit lokal (*Maramba*) dalam mendorong partisipasi pemilih yang sikap representasi politik elit lokal (*Maramba*) yang lebih diarahkan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki kesamaan geopolitik (suku, adat dan etnis).

Elit lokal (*Maramba*) merupakan kaum bangsawan dalam strata sosial masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Selain itu secara empiris elit lokal (*Maramba*) yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat di berbagai bidang termasuk politik. Dalam konteks pemilihan umum kepala daerah, *Maramba* yang adalah kaum bangsawan mempunyai andil yang besar dalam mempengaruhi masyarakat dan tentunya dapat memenangkan kandidat tertentu. Namun pada dasarnya elit lokal (*Maramba*) dalam kaitan dengan pemilu lebih mengorientasikan pada pemberian pengetahuan politik tentang calon atau kandidat tertentu. Dalam konteks politik, representasi politik elit lokal diasumsikan sangat besar terhadap masyarakat di Kabupaten Sumba Timur untuk mengajak dan mempengaruhi mereka agar ikut

⁵Sumber: KPUD Sumba Timur

berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Fenomena ini menarik keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan data awal diatas kemudian dikaitkan dengan hasil pengamatan dan pengalaman penulis, menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat dari representasi *maramba* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah.

Hal ini dikarenakan masyarakat adat di Kabupaten Sumba Timur sangat menghargai dan selalu mendengarkan para elit lokal (*Maramba*). Jika terjadi perselisihan, para elit lokal atau *Maramba* dapat menjadi penunjuk jalan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah. Elit lokal (*Maramba*) juga memiliki andil dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi dengan judul **“Representasi Politik *Maramba* Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015” (Studi Kasus Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah :

Apakah representasi politik *Maramba* menentukan kemenangan calon Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan representasipolitik *Maramba* dalam menentukan calon Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2015

1.3.2 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi masyarakat Kabupaten Sumba Timur, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami representasipolitik *maramba* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan menambah wawasan pengetahuan di bidang Ilmu Politik juga dapat mengembangkan kemampuan daya berpikir melalui karya ilmiah. Selain itu juga penelitian

ini sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang berminat dalam penelitian yang berkaitan dengan topik ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang berisikan tentang representasi elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik.